

**PERIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI GAMPONG BUENG  
BAK JOK KECAMATAN KUTA BARO ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**ANSARULLAH  
NIM. 170403056**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

# SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah-satu

Syarat untuk Memperoleh Gelar (S1)

Dalam Ilmu Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

**Ansarullah**

NIM. 170403056

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Mahmuddin, M.Si  
NIP. 19721020 199703 1 002

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

  
Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19751103 200901 1 008

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Manajemen Dakwah  
Diajukan Oleh:**

**Ansarullah**

NIM. 170403056

**Pada Hari/Tanggal**

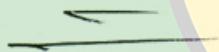
**Rabu, 12 Januari 2022**

**di**

**Ruang Sidang Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh**

**Dewan Penguji**

**Ketua Sidang**



**Dr. Mahmuddin, M.Si  
NIP. 19721020 199703 1 002**

**Sekretaris Sidang**



**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19751103 200901 1 008**

**Penguji I**



**Dr. Jailani, M.Si  
NIP. 19601008 199503 1 001**

**Penguji II**



**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag  
NIDN. 2025119101**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**



  
**Dr. Fakhri, S. Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ansarullah

NIM : 170403056

Jenjang : Strata (S-1)

Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 25 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Ansarullah  
NIM. 170403056

## ABSTRAK

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan saat pengamatan awal menunjukkan bahwa penggunaan ADG untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan masih sangat minim di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro. Penggunaan ADG untuk memberdayakan Ekonomi Kerakyatan masih belum menjadi perhatian khusus pemerintah Gampong. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perekonomian kerakyatan belum menjadi program khusus dan fokus daripada pemerintah Gampong Bueng Bakjok. Adapun pemberdayaan perekonomian kerakyatan pernah menjadi program dalam pembangunan Gampong. Berbagai program seperti budidaya ikan, pembuatan kue, penanaman bibit buahan pernah dilaksanakan namun tidak bertahan lama dan tidak berjalan lancar. Faktor pendukung dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu: pemerintah Gampong diberikan hak untuk mengelola ADG yang telah diatur dalam aturan pemerintah, adanya kesediaan perangkat pemerintahan Gampong beserta masyarakat untuk berdiskusi dalam musyawarah Gampong terkait pengelolaan ADG termasuk untuk mengusulkan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan serta pihak kecamatan yang bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi dan memfasilitasi dalam hal pembahasan pengelolaan ADG. Sedangkan Faktor penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu: Adanya program yang lebih diprioritaskan oleh pihak Gampong, kurangnya kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga saat program sudah ditetapkan dalam APBG program tersebut tidak berjalan dengan lancar ataupun tidak dilanjutkan dalam tahun anggaran baru serta kurangnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga program tidak berjalan lancar dan hasilnya masih belum maksimal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Ekonomi Kerakyatan*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan. Selanjutnya Shalawat dan Salam penulis hantarkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar sarjana sosial. Untuk itu penulis memilih judul “Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, ada banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat arahan, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Iskandar Nurdin dan Ibunda Fakhriani yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan putranya agar sukses dan selamat dunia akhirat. Ucapan terimakasih juga kepada Abangda Zawil Kirani dan kakak Yulma Azita

yang selalu memberi support dan motivasi agar tidak berhenti dan putus asa dalam meraih cita-cita.

2. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
3. Bapak Dr. Fakhri, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Prodi serta Bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh dosen manajemen dakwah yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih kepada Zulkrifan, Kareza Ansarestu, Malazi Irham, Amar Alfarizi, Mahardika Riski, Cut Askina, Risfatun Munawarah yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini - R A N I R Y

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pribadi

penulis dan semua pihak. Semoga kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 25 Desember 2021

Penulis,

Ansarullah



## DAFTAR ISI

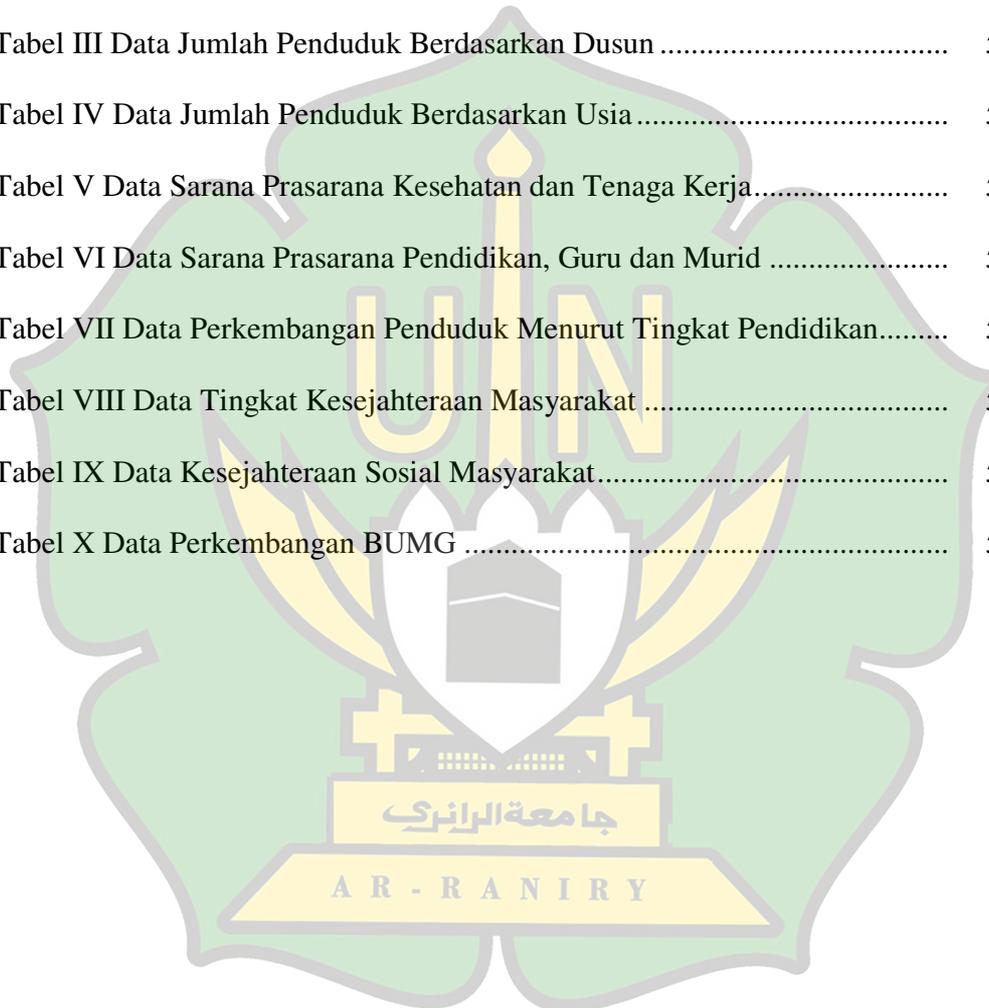
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan .....	10
B. Alokasi Dana Gampong.....	16
1. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) – Alokasi Dana Gampong.....	19
2. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong .....	20
C. Pemberdayaan Ekonomi .....	21
1. Pengertian Pemberdayaan dan Ekonomi.....	21
2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	23
3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	25
4. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Kerakyatan.....	28
5. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam Islam .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Sumber Data (Primer dan Sekunder) .....	40
D. Informan Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Observasi.....	41
2. Wawancara .....	42
3. Dokumentasi .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.....	57

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan .....	62
D. Pembahasan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I Data Nama Keuchik Tahun ke Tahun .....	46
Tabel II Data Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2015 .....	49
Tabel III Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun .....	50
Tabel IV Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	50
Tabel V Data Sarana Prasarana Kesehatan dan Tenaga Kerja.....	51
Tabel VI Data Sarana Prasarana Pendidikan, Guru dan Murid .....	52
Tabel VII Data Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel VIII Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat .....	53
Tabel IX Data Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	54
Tabel X Data Perkembangan BUMG .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>1</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>2</sup>

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah.<sup>3</sup>

Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 854

<sup>2</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 3

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 9.

saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.<sup>4</sup>

Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun dalam penelitian ini, penulis ingin melihat tentang penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. ADG merupakan hak gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Dapat dianalogikan bahwa ADG merupakan DAU/DAK bagi gampong, dan bagi sebagian banyak gampong, ADG adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PAG.

---

<sup>4</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara dan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014, hal. vii

Kelahiran UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Desa (Gampong-Pemerintah Aceh) memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD) – Alokasi Dana Gampong (ADG-Pemerintah Aceh). ADG yang diberikan ke gampong merupakan hak gampong. Sebelumnya, gampong tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan gampong. Saat ini, melalui ADG berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan gampong secara otonom.<sup>5</sup>

Kurang terarahnya distribusi ADG selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar gampong mengalokasikan anggaran ADG-nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit gampong yang mengarahkan anggaran ADG-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMG, Bank Gampong, Pasar Gampong, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan gampong, ataupun kegiatan produktif lainnya.

Demikian juga yang terjadi di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, penggunaan ADG untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan masih sangat minim di Gampong

---

<sup>5</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kab. Aceh Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Teuku Umar, 2018, hal. 2  
diakses pada <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/download/383/333> pada tanggal 8 Agustus 2021.

Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro. Adapun fokus penggunaan ADG ini untuk pembayaran Gaji Aparatur Gampong, kemudian menjalankan program mensejahterakan yatim piatu dengan mengucurkan anggaran 300.000,- perorang dan kegiatan fisik seperti pembuatan jalan dan lain sebagainya.

Penggunaan ADG di Gampong Bueng Bak Jok menempuh beberapa tahap pengalokasian anggaran. Ditahun 2020, lebih dari 200 juta rupiah ADG yang digunakan untuk pembangunan Gampong. Namun penggunaan ADG untuk memberdayakan Ekonomi Kerakyatan masih belum menjadi perhatian khusus pemerintah Gampong. Idealnya, pemerintah Gampong Bueng Bak Jok bisa memanajemen penggunaan ADG dan memasukkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar”**. Dalam penulisan ini, penulis memberi batasan kajian yaitu hanya membahas ADG terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang digunakan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar?

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing masing, begitu pula dengan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoristis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah mengenai Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

### **E. Definisi Operasional**

#### **1. Alokasi Dana Gampong (ADG)**

ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Disejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. ADG merupakan hak gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Dapat dianalogikan bahwa ADG merupakan DAU/DAK bagi gampong, dan bagi sebagian banyak gampong, ADG adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PAG. Untuk itu diharapkan aparatur gampong, utamanya Keuchik (Kepala Desa) lebih memposisikan ADG sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana

fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparat desa.<sup>6</sup>

Adapun menurut penulis, ADG merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh untuk dipergunakan kepada pembangunan Gampong.

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>7</sup>

Adapun menurut penulis, pemberdayaan yaitu proses mempergunakan suatu objek dengan sebaik mungkin untuk dimanfaatkan dalam tujuan tertentu.

## 3. Ekonomi Kerakyatan

<sup>6</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kab. Aceh Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Teuku Umar, 2018, hal. 2

<sup>7</sup>[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA\\_KAMIL/Pengertian\\_Pemberdayaan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/Pengertian_Pemberdayaan.pdf) diakses pada tanggal 4 Februari 2021

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>8</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>9</sup>

Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin)*, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.<sup>10</sup>

Adapun menurut penulis, ekonomi kerakyatan merupakan suatu proses keberpihakan pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat sehingga terbentuknya masyarakat yang sejahtera.

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 854

<sup>9</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 3

<sup>10</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin)*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006, Cet Ke-1, hal. 98

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan yaitu:

Pada bab I yaitu Pendahuluan, penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab II yaitu Kajian Pustaka, penulis mengemukakan hasil kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Penelitian Sebelumnya yang Relevan, Manfaat, Dana dan Pemberdayaan.

Pada bab III yaitu Metode Penelitian, penulis membahas mengenai Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Selanjutnya pada bab IV yaitu Pembahasan, penulis membahas mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dan Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

Sedangkan pada bab V yaitu bab terakhir, penulis membahas mengenai Kesimpulan Penulisan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti.

Setelah melakukan tinjauan pustaka pada penelitian yang relevan terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Berikut ini adalah penelitian yang relevan antara lain:

1. Skripsi Siti Muslihatun (2017) dengan judul Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu). Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu dan (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Fotocopy dan Percetakan Ammey tersebut.

Hasil penelitian didalam skripsi ini menunjukkan antara lain:<sup>11</sup>

- a. Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh Fotocopy dan Percetakan Ammey penetapan harganya menggunakan metode penetapan dengan pembulatan harga dan pada Fotocopy dan Percetakan Ammey menggunakan penetapan pembulatan harga dikarenakan sulitnya mencari uang recehan untuk kembalian.
- b. Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh Fotocopy dan Percetakan Ammey dalam penggunaan mekanisme penetapan pembulatan harga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual atau Fotocopy dan Percetakan Ammey, dengan memperhatikan daya beli masyarakat atau pelanggan. Penggunaan mekanisme pembulatan harga pada Fotocopy dan Percetakan Ammey tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang tertera, adapun pembayaran akan dibulatkan dengan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan Fotocopy dan Percetakan Ammey dalam menyediakan uang pecahan, sehingga harga dibulatkan tetapi sisa harga

---

<sup>11</sup> Siti Muslihatun, *Analisis Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017, hal. 68-69

dari hasil pembulatan di Fotocopy dan Percetakan Ammey bukan untuk kepentingan Fotocopy dan Percetakan Ammey dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pembulatan, tetapi sisa harga dari hasil pembulatan tersebut akan dialihkan untuk kotak amal Masjid/ dana sosial lainnya.

Adapun persamaan pembahasan skripsi diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ekonomi sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu skripsi diatas membahas tentang mekanisme penetapan harga jual berdasarkan ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

2. Skripsi Sulistiyono (2019) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015). Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu: (1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung tahun 2013-2015, (2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung tahun 2013-2015, (3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung tahun 2013-2015, (4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara

simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2015 dan (5) Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian menunjukkan antara lain:<sup>12</sup>

- a. Berdasarkan hasil analisis secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2015. Ini berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi belum efektif dan memacu penyerapan tenaga kerja.
- b. Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada variabel upah minimum menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2015. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kenaikan upah belum efektif dalam memacu penyerapan tenaga kerja dengan asumsi jika upah naik dengan hasil output tetap maka akan menambah nilai tambah produksi bagi perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan akan mengganti tenaga kerja dengan penggunaan mesin agar mengurangi pengeluaran terhadap upah pekerja.
- c. Berdasarkan hasil analisis pada variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi

---

<sup>12</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2019, hal. 113-114

Lampung. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan. Dikarenakan ketika jumlah output yang diproduksi meningkat, maka produsen akan menambah tenaga kerja dengan tujuan agar meningkatkan keuntungan atau laba di suatu perusahaan. Selain itu, pendidikan menjadi dasar dan syarat utama dalam memperoleh pekerjaan, karena pendidikan selalu berperan positif terhadap tinggi rendahnya pendidikan tenaga kerja.

- d. Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada penelitian dengan menggunakan uji regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2013-2015.
- e. Islam memandang bekerja bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup semata, tetapi dengan bekerja disyaratkan sebagai bentuk ibadah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik diri-sendiri, keluarga maupun untuk membantu sesama. Seseorang yang mampu bekerja dengan kemampuan dan pengetahuannya dapat meningkatkan martabat dan kemuliaannya. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan proses pembangunan ekonomi diharapkan menjadi tolak ukur suatu pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan dan berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja dan dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakatnya.

Adapun persamaan pembahasan skripsi diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ekonomi sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu skripsi diatas membahas tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

3. Skripsi Hanifa Tsany Hasna (2015) dengan judul Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia. Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pengaruh Keterbukaan Ekspor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia, (2) Untuk mengetahui pengaruh Keterbukaan Impor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia, dan (3) pengaruh Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia. Adapun hasil penelitian menunjukkan antara lain:<sup>13</sup>
  - a. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan variabel keterbukaan ekspor terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kenaikan keterbukaan ekspor akan menurunkan ketimpangan pendapatan.
  - b. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas keterbukaan impor terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Hanifa Tsany Hasna, *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia*, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hal. 78-79

- c. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas keterbukaan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan.
- d. Variabel kontrol tenaga kerja sektor agrikultur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Variabel kontrol tersebut memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara variabel kontrol angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah, dan tenaga kerja sektor industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- e. Terdapat pengaruh yang signifikan atas keterbukaan ekspor, keterbukaan impor, keterbukaan penanaman modal asing, angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah, tenaga kerja sektor agrikultur, dan tenaga kerja sektor industri secara bersama-sama (simultan) terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.7397 menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel kontrol secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 73.97% dan sisanya 26.03% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun persamaan pembahasan skripsi diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ekonomi sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu skripsi diatas membahas tentang Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia sedangkan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

## B. Alokasi Dana Gampong (ADG)

Kelahiran UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Desa (Gampong-Pemerintah Aceh) memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD) – Alokasi Dana Gampong (ADG-Pemerintah Aceh). ADG yang diberikan ke gampong merupakan hak gampong. Sebelumnya, gampong tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan gampong. Saat ini, melalui ADG berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan gampong secara otonom.<sup>14</sup>

ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Disejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. ADG merupakan hak gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Dapat dianalogikan bahwa ADG merupakan DAU/DAK bagi gampong, dan bagi sebagian banyak gampong, ADG adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PAG. Untuk itu

---

<sup>14</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kab. Aceh Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Teuku Umar, 2018, hal. 2  
diakses pada <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/download/383/333> pada tanggal 8 Agustus 2021.

diharapkan aparatur gampong, utamanya Keuchik (Kepala Desa) lebih memposisikan ADG sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.<sup>15</sup>

Menurut Rozaki, dkk yang diangkat dalam tulisan Faizatul Karimah dkk menyebutkan bahwa sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yakni merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan dibawahnya (desa/gampong). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.<sup>16</sup>

Adapun tujuan daripada ADG itu sendiri adalah:

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes) – (APBG-Pemerintah Aceh), dengan demikian sumber APBG terdiri dari Pendapatan Asli Gampong (PAG) ditambah ADG.
2. Untuk unsur keleluasaan bagi gampong dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta unsur kemasyarakatan.
3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi gampong.

---

<sup>15</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 2

<sup>16</sup> Faizatul Karimah, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan,* (Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 4: 2014), hal. 598

4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat gampong.<sup>17</sup>

Beberapa Manfaat ADG Bagi Kabupaten/Kota yakni: pertama Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota. Kedua Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan unsur untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Pengelolaan ADG harus menyatu di dalam pengelolaan APBG, sehingga prinsip pengelolaan ADGsama persis dengan pengelolaan APBG, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance yakni partisipatif, transparan, akuntabel, kesetaraan.<sup>18</sup>

#### 1. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) – Alokasi Dana Gampong (ADG)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada Fasal 72 Ayat (1.d) dan (4) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) berasal dari APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>19</sup>

Selanjutnya masih dalam UU yang sama pada Pasal 79, mengamanatkan pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

<sup>17</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 2

<sup>18</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 2

<sup>19</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 4

Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) – (RPJMG – Pemerintahan Aceh) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) – (RKPG – Pemerintahan Aceh) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan, mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia.

Di Aceh sendiri ADD disebut sebagai ADG (Alokasi Dana Gampong) disesuaikan dengan penggunaan nama Gampong untuk menggantikan Desa. ADG merupakan hak Gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Tujuan adanya ADG adalah untuk memperkuat kemampuan keuangan Gampong (APBG), dengan demikian sumber APBG terdiri dari PADes – PAG (Pendapatan Asli Gampong) ditambah ADG, untuk memberi keleluasaan bagi gampong dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan gampong, untuk mendorong terciptanya demokrasi gampong, untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat gampong.<sup>20</sup>

## 2. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Gampong dalam APBG, oleh

---

<sup>20</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 5

karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Gampong (ADG) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Gampong sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Gampong (ADG) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Gampong (ADG) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Gampong (ADG) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Gampong yang diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
5. Alokasi Dana Gampong (ADG) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.<sup>21</sup>

### **C. Pemberdayaan Ekonomi**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan dan Ekonomi**

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan

---

<sup>21</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 5

adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>22</sup>

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>23</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>24</sup>

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-

---

<sup>22</sup> Mustofa Kamil, *Pengertian Pemberdayaan*, Universitas Pembangunan Indonesia, hal. 1-2. diakses pada tanggal 4 Februari 2021

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 854

<sup>24</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 3

unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.<sup>25</sup>

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

## 2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah.<sup>26</sup> Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu

---

<sup>25</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal.2

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 9.

sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.<sup>27</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value). Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Boediono yang diangkat didalam skripsi Sulistiyono menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang, dimana persentase pertumbuhan output harus lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan akan berlanjut.<sup>29</sup>

Arsyad memandang pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan output tanpa melihat apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri ditandai dengan adanya laju kenaikan produk perkapita yang tinggi, sehingga untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah. Melalui data PDRB, dapat diketahui

---

<sup>27</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hal. 133.

<sup>28</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 35

<sup>29</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 36

seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan peranan masing-masing sektor ekonomi yang menyokong perekonomian suatu daerah.<sup>30</sup>

Definisi yang bersifat umum mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu apabila dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat sebagai akibat adanya kenaikan Gross Domestic Product (GDP) riil per kapita pada suatu periode tertentu.<sup>31</sup> Pertumbuhan ekonomi juga sangat penting dan dibutuhkan sebab tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan.<sup>32</sup> Disimpulkan bahwa proses produksi selalu membutuhkan sumber daya manusia sebagai faktor penggerak suatu perekonomian di suatu wilayah dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakatnya.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan “*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*” (pertumbuhan secara terus-menerus dari faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat manusia).

---

<sup>30</sup> Lyncolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE Edisi Pertama, 2010, hal.54.

<sup>31</sup> Sherly Ferdinandus, *Pengaruh Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Di Kota Ambon*, Benchmark, Vol. 2. No. 3 (Juli 2014). hal. 21.

<sup>32</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 37.

Berdasarkan pengertian ini, pertumbuhan menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Menurut Nasution, satu hal yang membedakan sistem Ekonomi Islam dengan sistem Ekonomi Konvensional adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenarnya dimana komponen-komponen ruhaniah masuk kedalam *falah* ini. Dalam Islam, esensi manusia ada pada ruhaniahnya karena seluruh kegiatan duniawi dalam aspek ekonomi tidak saja untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani dimana ruh merupakan esensi manusia.<sup>33</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sekadar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan peningkatan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor tersebut antara lain:

- a. Investible resources (sumber daya yang dapat diinvestasikan)
- b. Sumber daya manusia dan entrepreneurship

---

<sup>33</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 41

c. Teknologi dan inovasi.<sup>34</sup>

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berikut adalah penjelasannya:

1) Sumber daya yang dapat dikelola (invisible resources)

Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Sumber daya alam pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan disiapkan-Nya kepada manusia untuk kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai khlifah-Nya dimuka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَا كُلُّوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Q.S An Nahl: 14)

Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam memberikan petunjuknya sebagai berikut: yang pertama, Alquran dan Sunnah memberikan peringatan

<sup>34</sup> Irfan Syauqi Beik Dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 23.

bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu sumber rezeki. Yang kedua, manusia bertugas untuk mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam di muka bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah SWT. Yang ketiga, Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak. Yang keempat, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keaslian dan keindahan alam semesta.<sup>35</sup>

2) Sumber daya manusia (*human resources* dan Wirausaha)

Manusia adalah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua, kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan tetap memperhatikan kelestarian dan proporsi yang sesuai kebutuhan, adapun inti dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada adalah ditujukan untuk kemaslahatan

---

<sup>35</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 42.

bersama. Ekonomi Islam memandang adanya hubungan antara kedua sumber daya dan bagaimana pengolahan yang baik sesuai aturan.<sup>36</sup>

#### 4. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Kerakyatan

##### a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.<sup>37</sup>

Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di

<sup>36</sup> Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...*, hal. 43.

<sup>37</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara dan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014, hal. 7

dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.<sup>38</sup>

Pada masa sekarang ekonomi kerakyatan, menjadi sebuah wacana yang terus diulang dengan tanpa diketahui pasti anatomi dan struktur pastinya, semua ekonom baik yang berhaluan sosialis dan kapitalis akan berusaha untuk menjelaskan dampak ekonomi kepada rakyat. Waktu dan masa berganti dan tidak satupun yang mampu membuktikan bahwa rakyat, kaum marginal, bisa menikmati hasil kegiatan ekonomi secara adil dan merata.

Sukarno dengan konsep Marhaenismenya telah berusaha untuk membangun model ekonomi kerakyatan Indonesia dengan berpijak pada situasi dan kondisi rakyat Indonesia pada masanya, Soeharto berusaha membangun ekonomi kerakyatan dengan Repelitanya dengan basis pedesaan, era berganti dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi sebuah wacana yang semakin tidak jelas dan rakyat tetap berada dalam kemiskinan yang semakin kronis.<sup>39</sup>

Pada zaman reformasi pada masa pemerintahan SBY, mindset ekonomi tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru, pemerintah lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi. Sehingga terjadilah disparitas ekonomi yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin, seperti dilansir oleh Majalah Forbes yang berbasis di New York, Amerika Serikat telah disebutkan ada sekitar 40 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan mereka sebesar 88,6 miliar dollar AS atau setara Rp 850 triliun. Total kekayaan 40 orang

---

<sup>38</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan...*, hal. 8

<sup>39</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan...*, hal. 8

ini pada tahun 2012 meningkat 4 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian harta kekayaan Rp 850 triliun hanya dikuasai oleh 40 orang sementara bagi pekerja formal, termasuk buruh yang berjumlah 42,1 juta orang berbagi pendapatan senilai Rp 1450 triliun. Inilah perbedaan yang sangat menjulang antara si kaya dan si miskin ditengah system ekonomi pasar yang tidak mentabukan setiap orang memiliki kekayaan dalam jumlah yang begitu fantastis.<sup>40</sup>

Pemerintah selama ini lebih cenderung pro investor ini bisa dibuktikan dengan banyaknya investor yang menguasai sektor-sektor strategis seperti energi, migas, dan lain-lain. Pemerintah juga mengalami ketergantungan kepada hutang luar negeri. Sedangkan di sektor riil seperti usaha kecil menengah banyak yang mengalami gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi masih jauh dari harapan, bahkan ini menjadi sebuah cerminan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil menengah.<sup>41</sup>

Semua kebijakan yang memihak kepada rakyat adalah ekonomi kerakyatan, tidak perlu repot mendefinisikannya (Rizal Ramli, 2013), lalu bila Ekonomi Kerakyatan yang direfleksikan sebagai Solidaritas Sosial Ekonomi dan berarti “marilah membeli hasil produksi dalam negeri walau dengan harga yang sedikit mahal, atau marilah meminjam kepada koperasi walau dengan bunga yang lebih tinggi dari bank komersil”, apakah ini adalah suatu keadilan?. Bila demikian, maka hambatan implementasi ekonomi kerakyatan seperti yang telah

---

<sup>40</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan.....*, hal. 8

<sup>41</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan.....*, hal. 11

dikonsepkan oleh Bung Hatta pada masa sekarang adalah bermuara pada paradigma berpikir (mindset) baik dari pemerintah maupun rakyat Indonesia sendiri.<sup>42</sup>

Konsep ekonomi kerakyatan sekarang lebih didefinisikan sebagai usaha informal dengan hasil yang sedikit dan selalu digunakan sebagai obyek kampanye dalam setiap Pemilu, karena selalu memerlukan pertolongan.

Menurut Mubaryo, dalam ditulis dalam bukunya yang berjudul: *Reformasi Sistem Ekonomi* (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.<sup>43</sup>

Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin)*, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.<sup>44</sup>

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil.

---

<sup>42</sup> Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan*...., hal. 11

<sup>43</sup> Mubaryo, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999, Cet.Ke-1, hal.81

<sup>44</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin)*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006, Cet Ke-1, hal. 98

Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (participatory development). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

#### b. Ciri-Ciri dan Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> A.Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru: Unri Press, 2002, hal. 2-3

- 1) Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, ataupun sebagai tenaga kerja. Tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- 2) Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkat kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkannya akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKM, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan

dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.

- 3) Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan UKM harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan penghapusan praktek-praktek dan perilaku- perilaku ekonomi diluar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangan dengan sistem perpajakan progresif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakglainnya harus menjadi prioritas Hal ini dilakukan antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-desa sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.

5) Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>46</sup>

c. Aspek-Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Mempersiapkan Model Ekonomi Kerakyatan

a) Aspek Pembinaan

Merupakan pembinaan baik Sumber Daya Manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi.

b) Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk Community Development (CD) sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM.

c) Aspek Kemitraan

Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerja sama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan.

d) Aspek Yuridis Formal

---

<sup>46</sup> Soeharto Prawiro Kusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep Kebijakan dan Strategi*, Yogyakarta: BPFE, hal. 4

Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah.<sup>47</sup>

#### 5. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Islam

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang menggunakan instrumen-instrumen dalam pelaksanaannya selalu berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat dan bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur serta adil dalam bertindak yang pencapaiannya sejahtera di dunia dan bahagia diakhirat. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).<sup>48</sup>

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Prinsip Syariah sebenarnya cukup jelas dan berkeadilan, sehingga sangat sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjaga keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Sayangnya banyak konsep yang baik dari Solusi Syariah ini belum difahami oleh masyarakat. Aqad-aqad Syariah penunjang transaksi ekonomi juga mempunyai rentang cakupan yang cukup luas dan layak diterapkan. Sementara investasi pada Efek berupa Saham maupun Obligasi pada hakekatnya sesuai dengan prinsip Syariah, kecuali pada hal-hal tertentu yang memerlukan

---

<sup>47</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan..., hal. 98.*

<sup>48</sup> Suhendi, *Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, Universitas Tabrani Pekanbaru, hal. 307

penyesuaian. Khususnya pada kegiatan usaha dan hasil usaha Emiten yang harus memenuhi prinsip halal dan baik (thoyib).

Kepedulian pada Masyarakat Sekitar Ide dasar dari ekonomi Syariah adalah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT, termasuk kelebihan yang diberikan kepada sebagian manusia, untuk kemaslahatan manusia khususnya masyarakat terdekat (tetangga). Oleh karena itu harus ada alokasi yang jelas bagi pembiayaan untuk kegiatan ekonomi masyarakat terdekat tersebut. Ekonomi merupakan kegiatan sosial masyarakat. Dalam perkembangannya kegiatan ekonomi mengalami perubahan-perubahan dari jaman dahulu sampai sekarang. Salah satu perubahan yang muncul sebuah istilah Ekonomi Islam (syariah) Ketidakmampuan dalam mengelola ekspektasi tindakan-tindakan yang akan diambil spekulasi mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi.<sup>49</sup>

Untuk mengendalikan aksi spekulasi dan mengatasi krisis, perlu orang-orang yang memahami cara bekerja sistem ekonomi kerakyatan yang ada. Ini amat penting untuk mencegah krisis ekonomi yang bekepanjangan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit” perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya: “membumikan” ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja. Karena Islam adalah agama amal. Sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual. Demikianlah teori baru (ilmu) ekonomi kerakyatan menegaskan yang

---

<sup>49</sup> Suhendi, *Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan,...*, hal. 308

sebaiknya yaitu ekonomi rakyat yang tidak sekedar membahas rumah tangga konsumsi, tetapi juga rumah tangga produksi, yang tentu saja juga mampu melakukan investasi. Ekonomi Kerakyatan adalah ilmu ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat, ekonomi yang bermoral kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Suhendi, *Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan,....*, hal. 308

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>51</sup> Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>52</sup> Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Contoh dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. Disamping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.<sup>53</sup> Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hal. 4.

<sup>52</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 24.

<sup>53</sup> Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

<sup>54</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), hal. 35.

Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.<sup>55</sup> Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan (*field reasearch*).

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan penulis menilai bahwa penggunaan ADG masih belum tersalurkan secara penuh untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Perioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

### **C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)**

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun data primer dalam penulisan ini yaitu hasil survei dan wawancara yang peneliti lakukan.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan

---

<sup>55</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu...*, hal. 26.

informasi. Adapun data sekunder yaitu buku, jurnal situs dan sumber pendukung lainnya.

#### **D. Informan Penelitian**

Sumber Informan dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Camat Kuta Baro, Keuchik Bueng Bak Jok, Sekretaris Gampong, Bendahara serta Kepala Dusun Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Dipilihnya sumber informan ini atas alasan mereka lebih mengetahui tentang seluk beluk Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan serta masyarakat Gampong Bueng Bak Jok sebanyak 6 orang. Keseluruhan berjumlah 11 orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Burhan Bungin menyebutkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui

pengamatan dan pengindraan.<sup>56</sup> Dalam pengertian lain, observasi adalah pengamatan, pencatatan yang sistematis tentang fenomena penyidikan dengan alat indra. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun data penelitian lainnya.

Secara spesifik, sasaran observasi ditujukan pada Pengalokasian Dana Gampong dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dimana penulis terlebih dahulu mengamati objek daripada yang ingin di teliti.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dan menentukan materi yang akan ditanyakan serta kapan dimulai dan kapan diakhiri. Sedangkan informan adalah orang yang di wawancarai dan memberikan informasi kepada pewawancara.<sup>57</sup>

Untuk memperoleh data yang lebih valid, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang menjabat sebagai Bapak Camat Kuta Baro, Keuchik Bueng Bak Jok, Sekretaris Gampong, Bendahara dan Kepala Dusun Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Dipilihnya sumber informan ini atas alasan mereka lebih mengetahui tentang seluk beluk Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan serta

---

<sup>56</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 115.

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 108.

masyarakat Gampong Bueng Bak Jok sebanyak 6 orang. Dengan demikian, jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, foto, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti perlu mengumpulkan data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data dokumentasi ini termasuk diantaranya Visi-Misi, Data ADG dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar serta dokumentasi saat melaksanakan penelitian yang bersumber dari dokumen Gampong Bueng Bakjok dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif ...*, hal. 123.

<sup>59</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 152.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas tiga tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap reduksi data
3. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Pemuda Gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri yang telah ditelaah, dikaji, dan simpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.<sup>61</sup> Data dalam rangkaian kualitatif selalu berbentuk rangkaian kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Analisis data merupakan upaya menelaah secara kritis terhadap data penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

---

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 139.

<sup>61</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch ...*, hal. 46.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Gampong Bueng Bak Jok**

Gampong Bueng Bakjok pada awal mulanya merupakan bagian wilayah Gampong Cot Mancang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Terbentuknya gampong Bueng Bakjok dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang diikuti dengan emosional yang tinggi. Hal ini dipengaruhi juga karena geuchik Cot Mancang waktu itu yang dijabat oleh orang Bueng Bakjok, yaitu Waki Mud (nama panggilan) sedangkan nama aslinya Mahmud.<sup>62</sup>

Gampong Bueng Bakjok pada awalnya terbentuk dari pengumpulan beberapa penduduk atau kepala keluarga, mereka menetap dan membangun rumah diatas bukit-bukit yang dikelilingi oleh hutan-hutan kecil. Pada saat itu mereka dipimpin oleh pimpinan yang ditunjuk oleh mukim disebut wakil mukim. Setelah beberapa tahun kemudian penduduk sudah bertambah banyak sehingga atas musyawarah bersama antara pimpinan mukim serta tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan uleebalang, maka terbentuklah sebuah gampong yang diberi nama gampong Bueng Bakjok.<sup>63</sup>

Sistem pemerintahan Gampong Bueng Bakjok berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh

---

<sup>62</sup> Dokumen Gampong Bueng Bakjok yang diambil pada tanggal 28 November 2021 di Kantor Keuchik.

<sup>63</sup> Dokumen Gampong Bueng..., diambil pada tanggal 28 November 2021 di Kantor Keuchik.

dua orang Wakil Geuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah Kepala Dusun. Wakil Geuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.<sup>64</sup>

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu, roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Pak Geuchik dan di Meunasah (tengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu hingga kini belum ada Kantor Geuchik. Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Bueng Bakjok atau Geuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Dokumen Gampong Bueng..., diambil pada tanggal 28 November 2021 di Kantor Keuchik.

**Tabel I**  
**Kondisi Pemerintahan Gampong Bueng Bakjok Berdasarkan Nama**  
**Keuchik Tahun Ke Tahun**

No	Tahun	Nama Geuchik	Kondisi Pemerintahan	Narasumber	Ket
1.	1945-1946	Waki Mahmud	Tidak teratur dan masih dalam keadaan kacau	Tgk. Sulaiman	Mantan Tuha Peut Gampong
2.	1947-1957	K.T. Hasan	Tidak teratur dan masih dalam keadaan kacau	Tgk. Sulaiman	Mantan Tuha Peut Gampong
3.	1958-1960	Tgk. M. Amin	Gotong royong masyarakat sangat di perlukan dalam pembangunan gampong pasca kemerdekaan 1945	Tgk. Sulaiman	Mantan Tuha Peut Gampong
4.	1961-1976	T. Budiman	Kehidupan masyarakat sangat kental dengan suasana gotong royong	Tgk. Sulaiman	Mantan Tuha Peut Gampong
5.	1977-1981	Hasan Makam	Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal	Hasan Makam	Mantan Geuchik Gampong
6.	1982-1994	T. Jalaluddin	Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal	Drs. Junaidi	Mantan Geuchik Gampong
7.	1994-2005	Usman Gam	Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal	Drs. Junaidi	Mantan Geuchik Gampong
8.	2005-2011	Drs. Junaidi	Pada masa konflik kehidupan masyarakat tidak normal	Drs. Junaidi	Mantan Geuchik Gampong

9.	2011-2017	Said mukhtar	Kegiatan Pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan berjalan dengan normal	Said Mukhtar	Matan geuchik gampong
10	2017-2023	Hafidh Maksum	Percepatan pembangunan di segala bidang	M. Hasan	Geuchik sekarang

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

## 2. Kondisi Umum Gampong

### a. Kondisi Geografis

Gampong Bueng Bakjok terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 246 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Bueng Bakjok Berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Seupe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Cot Beut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Cot Mancang

### b. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah Gampong sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Gampong. Berdasarkan hidrologinya Gampong Bueng bakjok memiliki aliran sungai/irigasi berasal dari waduk desa Atong atau sungai Seulimum, Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih maupun sumber air pertanian.

### c. Luas dan Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Bueng Bakjok hanya sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Gampong Bueng bakjok memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Gampong Bueng Bakjok 246 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2015**

Jenis Lahan	Luas
Pemukiman	27 Ha
Persawahan Teknis	30 Ha
Persawahan ½ Teknis	8 Ha
Persawahan Tadah Hujan	10 Ha
Perkebunan	30 Ha
Hutan Rakyat	87 Ha
Hutan Negara	25 Ha
Hutan Lindung	-
Pekarangan	27 Ha
Taman	-
Perkantoran	-
Lahan Perkuburan Umum	0,25 Ha
<b>Jumlah</b>	<b>246 Ha</b>

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

### 3. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Bueng Bakjok yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 210 KK, 722 Jiwa, terdiri dari laki-laki 344 jiwa, perempuan 377 jiwa.

**Tabel III**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Cot sijho	41	80	85
Bung bakjok	79	129	142
Cot abi	31	61	63
Bueng iton	59	75	87
Jumlah	210	344	377

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

**Tabel IV**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Kel Usia	L	P	Jlh	Percentage (%)
1	0-4	8	13	21	2,9
2	5-9	14	14	28	3,8
3	10-14	45	45	90	12,46
4	15-19	19	30	49	6,7
5	20-24	19	26	45	6,2
6	25-29	41	48	89	12,3
7	30-39	55	52	107	14,81
8	40-49	78	80	158	21,8
9	50-59	34	32	66	9,1
10	> 60	31	37	68	9,4
<b>JUMLAH</b>		<b>344</b>	<b>377</b>	<b>722</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

#### 4. Kesehatan

Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah memprogramkan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) untuk seluruh masyarakat Aceh, hal ini sangat membantu kondisi kesehatan dari masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit Umum demi kelancaran pasien/masyarakat terutama masyarakat miskin /kurang mampu.

Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Gampong

Bueng Bakjok pada tahun 2015 terdiri atas:

**Tabel V**  
**Sarana prasarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan**

No	Sapras Kesehatan	Volume	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-	Dokter	
			Perawat	
2	Puskesmas	-	Dokter	
			Perawat	
3	Polindes	1	Dokter	
			Bidan desa	1
4	Klinik	-	Dokter	
			Perawat	
5	Pos Yandu	1	Bidan	1
			Kader	5
6	Toko Obat/ Apotik	-		
7			Mantri	-
8			Dukun Bayi	-

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

## 5. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Gampong Bueng Bakjok akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Gampong Bueng Bakjok, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini:

**Tabel VI**  
**Sarana Prasarana Pendidikan, Guru dan Murid**

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Volume	Status	Lokasi	Jumlah	
					Guru	Murid
1	PAUD	-				
2.	TK	-				
3.	SD, SMP, SMA/ sederajat	-				
4.	BALAI PENGAJIAN	1		Ds, Cot Abi	1	30

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

**Tabel VII**  
**Perkembangan Penduduk menurut tingkat pendidikan Tahun 2015**

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Tamat Sekolah SD	24 Orang
2	Tamat Sekolah SD	82 Orang
3	Tamat Sekolah SLTP	40 Orang
4	Tamat SMU	206 Orang
5	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	11 Orang
6	Tamat Strata I	29 Orang
7	Tamat Strata II	2 Orang
Jumlah		394 Orang

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

## 6. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Aceh merupakan daerah konflik yang cukup panjang, hal ini sangat mempengaruhi dari tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari daerah lain. Dengan lamanya waktu konflik ditambah musibah gempa dan tsunami yang terjadi Tahun 2004 maka mempengaruhi lambannya pertumbuhan tingkat kesejahteraan rakyat Aceh dan masyarakat Kecamatan Kuta Baro khususnya.

Namun setelah musibah tsunami datanglah hikmah, banyak hal terjadi seperti berhentinya konflik, kedatangan donatur baik dari dalam negeri maupun dari seluruh penjuru dunia, maka tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan dari kondisi sebelumnya.

**Tabel VIII**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

No	Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Persentase
1	- KK Prasejahtera	15	19,7
2	- KK Sejahtera I	20	26,3
3	- KK Sejahtera II	13	17,1
4	- KK Sejahtera III	28	36,8
5	- KK sejahtera 3 Plus	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari data tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

**Tabel IV**  
**Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak terlantar	-	
2	Anak Jalanan	-	
3	Lansia Terlantar	-	
4	Pengemis	-	
5	Korban Narkoba	-	
6	Eks Narapidana	-	
7	Penyandang Cacat (Tuna netra, tuna rungu, tuna bicara)	8	
8	Keluarga Miskin	50 KK	
9	Keluarga Sangat Miskin	21 KK	
10	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	5 KK	
11	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	6 kk	
12	Pemulung	-	
13	Janda Konflik	-	
14	Korban Bencana Alam	-	
15	Komunitas Adat Terpencil	-	

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

## 7. Perekonomian Gampong

Secara umum masyarakat di Gampong Bueng Bakjok memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh,

pertukangan, penjahit, dll. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.

Gampong Bueng Bakjok memiliki Badan Usaha Milik Gampong yang didirikan dengan Qanun Gampong No.02 Tahun 2012, dengan SK Pengurus No. 03 Tahun 2012. Sampai saat ini BUMG memiliki 1 Unit Usaha yaitu Unit Simpan Pinjam kelompok Perempuan dengan perkembangan sebagai berikut:

**Tabel X**  
**Perkembangan BUMG Gampong Bueng Bakjok**

No	Keterangan	Awal	Sekarang	Perkembangan
1	Dana	10.000.000	80.000.000	70.000.000
2	Jlh Kelompok	1	2	2
3	Jlh Anggota	10	50	40

Sumber Data: Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

Adapun Tujuan pendirian BUMG yaitu:

- a. Meningkatkan Perekonomian Gampong
- b. Mengoptimalkan Aset Gampong untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong atau Pihak ke-3.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- f. Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
- h. pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.

Dengan melihat tujuan dari pendirian BUMG, dapat dirasakan bahwasanya BUMG Gampong Bueng Bakjok masih jauh dari pada yang diharapkan, sehingga perlu pengembangan yang lebih baik dengan melakukan pembenahan dalam struktur organisasi maupun pengelolaan unit-unit usaha sesuai dengan aset dan potensi yang ada dengan mengacu pada Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes.

Kondisi Ekonomi Gampong Bueng Bakjok dapat dibagi dalam 2 (dua) sumber yang dominan, yaitu:

a) Potensi sumber Daya Alam

Gampong Bueng Bakjok merupakan daerah daratan persawahan, daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Secara umum masyarakat Gampong Bueng Bakjok melakukan kegiatan pertanian (tanaman pangan/hortikultura dan perkebunan). dan peternakan (lembu, kambing, ayam)

b) Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya - Manusia di Gampong Bueng Bakjok sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan dan informasi termasuk dekat Ibu Kota Provinsi Aceh.

## **B. Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar**

ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 20144 Tentang Desa pada Fasal 72 Ayat (1.d) dan (4) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) berasal dari APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>65</sup>

Penggunaan ADG di Gampong Bueng Bak Jok menempuh beberapa tahap pengalokasian anggaran. Ditahun 2020, lebih dari 200 juta rupiah ADG yang digunakan untuk pembangunan Gampong. Namun penggunaan ADG untuk memberdayakan Ekonomi Kerakyatan masih belum menjadi perhatian khusus pemerintah Gampong. Berikut hasil wawancara penulis dengan aparatur gampong dan masyarakat terkait penggunaan ADG dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Gampong Bueng Bakjok:

Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro menyebutkan bahwa dalam mengelola ADG dimulai dengan musrenbang yang dituangkan kedalam RKPG yang kemudian dituangkan kedalam APBG Gampong sebagai pedoman pengelolaan ADG. Dalam pengelolaannya ada

---

<sup>65</sup> Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan...*, hal. 4

tim yang mengelola terdiri dari Keuchik, Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong serta satu orang yang ditunjuk oleh Keuchik untuk melakukan pembangunan. Dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dilakukan melalui BUMG. ADG juga diprioritaskan untuk pemberdayaan Gampong, ADG merupakan tugas dan tanggung jawab Gampong. Terkait dengan program pemberdayaan Gampong, itu dimusyawarahkan dan disepakati dan diputuskan oleh Gampong.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perekonomian kerakyatan diawali dengan musrenbang yang dituangkan kedalam RKPG yang kemudian dituangkan kedalam APBG Gampong sebagai pedoman pengelolaan ADG. Kemudian ada tim yang mengawasi dan melakukan pembangunan, pengelolaan ADG tentang program pemberdayaan Gampong, itu dimusyawarahkan dan disepakati dan diputuskan oleh Gampong.

Wawancara dengan Bapak Hafizh Maksu selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok menjelaskan bahwa penggunaan ADG sudah diatur oleh Perbup seperti penggunaan untuk gaji aparatur, santunan yatim/piatu serta pembangunan Gampong. Kalau untuk prioritas pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum ada program secara khusus. Namun pernah dilaksanakan program seperti pembuatan kue, teknak namun tidak bertahan lama.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Maksu selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok dapat disimpulkan bahwa penggunaan ADG sudah diatur oleh Perbup seperti penggunaan untuk gaji aparatur, santunan serta pembangunan Gampong. Sedangkan terkait dengan prioritas pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum ada program secara khusus. Namun pernah

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 27 November 2021

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayed Mahzar selaku Kepala Dusun Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

dilaksanakan program seperti pembuatan kue, teknak namun tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Wawancara dengan Bapak Sayed Mahzar selaku kepala dusun menyebutkan bahwa di Gampong Bueng Bakjok ada dibuatnya satu program dari ADG yaitu ternak ikan dan penanaman pohon pinang, tetapi program tersebut tidak berjalan dengan baik maupun adanya hambatan. ADG tahun 2018-2019 juga dipergunakan untuk program pembangunan rumah yang kemudian dijadikan rumah sewa.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sayed Mahzar selaku kepala dusun dapat disimpulkan bahwa pernah adanya dilaksanakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Gampong Bueng Bakjok namun tidak berjalan dan bertahan lama.

Wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong menyebutkan bahwa, ADG tidak diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. ADG di fokuskan untuk pembangunan Gampong. Namun dalam pengelolaannya, ada beberapa program seperti teknak sapi, pembuatan kolam ikan, pembangunan rumah sewa.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong dapat disimpulkan bahwa ADG tidak diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. ADG di fokuskan untuk pembangunan Gampong. Namun dalam pengelolaannya, ada beberapa program seperti teknak sapi, pembuatan kolam ikan, pembangunan rumah sewa.

Wawancara dengan Ibu Riska Fitria selaku bendahara Gampong Bueng Bakjok menyebutkan bahwa ADG digunakan untuk pembangunan gampong seperti pengadaan fasilitas komputer, pembangunan rumah sewa, gaji aparatur, gaji guru PAUD, santunan anak yatim. Semua itu dari ADG.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Maksu selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

Kalau fokus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara khusus tidak ada.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska Fitria selaku bendahara Gampong Bueng Bakjok ADG digunakan untuk pembangunan gampong seperti pengadaan fasilitas komputer, pembangunan rumah sewa, gaji aparatur, gaji guru PAUD, santunan anak yatim. Namun jika untuk prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat belum ada secara khusus.

Wawancara dengan ibu Nuraida selaku masyarakat menyebutkan ADG digunakan untuk kegiatan pembangunan Gampong seperti kegiatan PAUD, kemudian untuk rehabilitasi jalan di lorong yang sudah rusak, untuk pembangunan gapura. ADG juga pernah di programkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pembuatan kue namun tidak berjalan dengan lancar.<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraida selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa ADG digunakan untuk pembangunan seperti pembuatan jalan dan lain sebagainya. Jika terkait dengan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat pernah dilaksanakan seperti pembuatan kue namun tidak berjalan dengan lancar.

Wawancara dengan ibu Sulasmi selaku masyarakat Gampong Bueng Bakjok menyebutkan bahwa pengelolaan ADG sudah baik. Dulu pernah dilakukan program budidaya ikan namun tidak berjalan lama. Pernah juga dilakukan program pembuatan kue tapi sama seperti sebelumnya, tidak berjalan lama.<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa di Gampong Bueng Bakjok ada dilaksanakannya program

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Riska Fitria selaku Bendahara Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nuraida selaku Masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku Masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembuatan kue namun tidak bertahan lama. Menurutnya, pengelolaan ADG sudah berjalan dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro menyebutkan bahwa Sebenarnya, ADG ditekankan untuk menanggulangi kemiskinan dengan ekonomi kerakyatan. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan di Gampong apakah dilakukan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau tidak. Jika memang di programkan dan di fokuskan maka akan sesuai dengan cita-cita yaitu kesejahteraan masyarakat. Di Gampong Bueng Bakjok sudah ada program pembangunan rumah sewa, namun berjalan tidaknya itu tergantung oleh Gampong, pemerintah Gampong tidak bisa mengintervensi terkait dengan program pemberdayaan Gampong karna hal tersebut berdasarkan musyawarah Gampong. Dalam penyusunannya, program kerja diawali dengan Musrenbang yang berujung kepada RKPG dan APBG. Pembangunan tersebut dilakukan berdasarkan dengan APBG, Muspika hanya memfasilitasi dalam penyusunan program seperti rapat-rapat ataupun musrenbang, namun tidak masuk lebih dalam ataupun mengatur, terkait dengan pemberdayaan perekonomian kerakyatan kembali kepada Gampong. Peran Camat dalam pemberdayaan perekonomian kerakyatan hanya bertanggung jawab memfasilitasi dan mengawasi serta menyampaikan aturan-aturan yang sudah ada.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro bahwa sudah ada program pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti pembangunan rumah sewa. Namun terkait dengan pelaksanaan program ini, pemerintah kecamatan hanya mengarahkan saja, tidak dapat mengintervensi karena keputusan tersebut murni dari musyawarah Gampong.

Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku masyarakat menyebutkan bahwa ADG di gampong dikelola dengan baik untuk pembangunan gampong seperti pembuatan jalan yang rusak, pengelolaan PAUD, pembuatan gapura dan lain sebagainya. Jika untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat masih minim. Pernah dilaksanakannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti ternak, kolam ikan, pembuatan kue tapi tidak bertahan lama dan tidak lancar programnya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 27 November 2021.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program yang diusung belum difokuskan untuk pembangunan dibidang pemberdayaan perekonomian masyarakat. Program pemberdayaan perekonomian pernah dilaksanakan namun tidak bertahan lama. ADG difokuskan untuk program pembangunan fisik, pengeloan PAUD dan lain sebagainya.

Wawancara dengan Ibu Fitriyani selaku masyarakat menyebutkan bahwa ada program pemberdayaan perekonomian untuk masyarakat seperti membuat kue, budidaya ikan, pembangunan rumah sewa tetapi belum berjalan dengan baik dalam artian tidak bertahan lama programnya. ADG lebih difokuskan untuk program lain.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriyani selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Gampong Bueng Bakjok belum difokuskan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat melainkan ada program lain yang lebih di utamakan. Pembangunan dibidang pemberdayaan perekonomian masyarakat dilaksanakan namun tidak bertahan lama.

Berikut tabel penggunaan ADG untuk program ekonomi kerakyatan:

No.	Alokasi ADG untuk Ekonomi Kerakyatan	Estimasi Anggaran
1.	Ternak Lele	Rp. 10.000.000
2.	Bantuan Sapi sebanyak 2 ekor	Rp. 15.000.000
3.	Biji Pinang	Rp. 500.000

Dokumen Gampong Bueng Bakjok Tahun 2018

Berikut tabel penggunaan ADG Gampong Bueng Bakjok yang berhubungan dengan Ekonomi Kerakyatan dan juga kebutuhan dalam pembangunan Gampong Bueng Bakjok:

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fitriyani selaku masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021.

No.	Tahun	Estimasi Anggaran
1.	Tahap I tahun 2018	Rp. 34.570.000
	Tahap II tahun 2018	Rp. 40.570.000
	Tahap III tahun 2018	Rp. 36.293.000
2.	Tahap I dan II tahun 2019	Rp. 532.198.000
	Tahap III tahun 2019	Rp. 31.578.000
3.	Tahap I tahun 2020	Rp. 72.519.580
	Tahap III tahun 2020	Rp. 68.519.580
	Tahap IV tahun 2020	Rp. 69.335.070

Data tahun 2018, 2019, 2020 Gampong Bueng Bakjok

### C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam setiap pelaksanaan program baik pembangunan maupun lain sebagainya, tentu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya program tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ADG dalam pemberdayaan perekonomian kerakyatan di Gampong Bueng Bakjok:

#### 1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ADG dalam pemberdayaan perekonomian kerakyatan di Gampong Bueng Bakjok antara lain:

Wawancara dengan Bapak Hafizh Maksum selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok menjelaskan bahwa dalam pengelolaan ADG terkhusus dibidang pemberdayaan perekonomian kerakyatan, adanya aturan yang diterbitkan oleh pemerintah terutama dalam menyusun

program berdasarkan musyawarah Gampong menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan programnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Maksum selaku Keuchik dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten menyebabkan mudahnya dalam proses merealisasikan program sehingga mempunyai legalitas tersendiri. Ini juga menjadi arah dalam proses pembangunan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Raimah selaku masyarakat menyebutkan bahwa dengan adanya musyawarah Gampong, masyarakat dapat berdiskusi untuk menentukan program apa saja yang bisa dilaksanakan untuk pembangunan dibidang Pemberdayaan perekonomian masyarakat.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raimah dapat disimpulkan bahwa musyawarah Gampong menjadi faktor pendukung dalam proses merealisasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Dengan adanya musyawarah Gampong, masyarakat dapat berdiskusi sehingga dapat menentukan arah pembangunan.

Wawancara dengan Bapak Anwar selaku sekretaris Gampong menyebutkan bahwa adanya aturan yang mengatur terkait dengan pengelolaan ADG, memudahkan pemerintah Gampong melaksanakan pembangunan sehingga pemerintah Gampong dapat menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan di Gampong itu sendiri.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar dapat disimpulkan bahwa aturan pemerintah menyebabkan mudahnya pemerintah Gampong dalam mengambil kebijakan terhadap arah pembangunan di Gampong Bueng Bakjok,

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Maksum selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Raimah selaku masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Riska Fitria selaku bendahara Gampong Bueng Bakjok menyebutkan bahwa adanya arahan dan pengawasan dari pemerintah terumata Muspika dalam pembangunan Gampong khususnya dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, memudahkan pemerintah Gampong dalam melakukan program yang telah diputuskan dalam APBG. Ini menjadi faktor pendukung penting.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska Fitria dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, Muspika memfasilitasi dan mengarahkan serta menjelaskan aturan yang ada sehingga memudahkan pihak Gampong dalam melaksanakan berbagai program yang telah di usulkan.

## 2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan ADG dalam pemberdayaan perekonomian kerakyatan di Gampong Bueng Bakjok antara lain:

Wawancara dengan Bapak Hafizh Maksum selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok menjelaskan bahwa faktor penghambat yaitu adanya program pembangunan dibidang lainnya yang telah di sepakati dan disahkan dalam APBG sehingga program dalam bidang ekonomi masyarakat belum berjalan. Namun akan diprogramkan dengan kesepakatan bersama dalam musyawarah Gampong.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Maksum selaku Keuchik dapat disimpulkan bahwa pemerintah Gampong telah merancang program lainnya sehingga program perekonomian masyarakat belum berjalan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Riska Fitria selaku Bendahara Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Maksum selaku Keuchik Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

namun program pemberdayaan perekonomian tetap akan dibahas dan diprogramkan dalam musyawarah Gampong.

Wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong menyebutkan bahwa keseriusan masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perekonomian Kerakyatan sehingga jika dijalankan akan bertahan dan mendapatkan hasil yang baik seperti budidaya ikan, pembuatan kue dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong dapat disimpulkan bahwa kurangnya keseriusan masyarakat dalam program pemberdayaan perekonomian sehingga program tersebut terbengkalai. Untuk dapat merealisasikannya, dibutuhkan keseriusan sehingga dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan.

Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku masyarakat menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan dalam mengelola seperti budidaya dan pembuatan kue juga menjadi faktor penghambat, pemerintah Gampong diharapkan agar dapat memberikan edukasi terkait dengan program pemberdayaan perekonomian sehingga dapat berjalan dengan baik dikemudian hari.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya pengetahuan dalam mengelola seperti budidaya ikan dan pembuatan kue sehingga hasilnya kurang maksimal.

Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat menyebutkan bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perekonomian masyarakat menjadikannya sebagai faktor penghambat. Keseriusan dalam program pemberdayaan perekonomian masyarakat juga

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Sekretaris Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri selaku masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021.

masih kurang sehingga setiap program yang di jalankan tidak bertahan lama.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat dapat disimpulkan bahwa keseriusan dan kesadaran akan pemberdayaan perekonomian masyarakat masih sangat minim sehingga berbagai program yang dijalankan belum mempunyai hasil yang maksimal sehingga hal ini menjadi salah-satu faktor penghambat dalam suksesnya program pemberdayaan perekonomian kerakyatan.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemberdayaan perekonomian kerakyatan belum menjadi program khusus dan fokus daripada pemerintah Gampong Bueng Bakjok. Adapun pemberdayaan perekonomian kerakyatan pernah menjadi program dalam pembangunan Gampong. Berbagai program seperti budidaya ikan, ternak sapi, pembuatan kue, penanaman bibit buahan pernah dilaksanakan namun tidak bertahan lama dan tidak berjalan lancar. Program pembangunan tersebut berawal dari Musrenbang yang turunannya yaitu RKPG dan ditetapkan dalam APBG. Program tersebut berdasarkan aturan yang berlaku dan juga murni dari musyawarah Gampong. Didalam musyawarah Gampong, berbagai diskusi mengenai pembangunan dibahas termasuk pemberdayaan perekonomian kerakyatan. Program perekonomian kerakyatan merupakan hal terpenting dalam menekan angka kemiskinan serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun di Gampong Bueng Bakjok, program pemberdayaan perekonomian tidak berjalan dengan lancar dalam artian tidak

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Gampong Bueng Bakjok pada tanggal 29 November 2021.

berlanjut ketahun selanjutnya. Gampong memiliki program lainnya yang diprioritaskan seperti pembangunan jalan yang rusak, pengelolaan PAUD dan sebagainya.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam realisasi pembangunan pemberdayaan perekonomian kerakyatan yaitu:

- 1) Adanya hak untuk mengelola ADG yang telah diatur dalam aturan pemerintah
- 2) Adanya kesediaan perangkat pemerintahan Gampong beserta masyarakat untuk berdiskusi dalam musyawarah Gampong terkait pengelolaan ADG termasuk untuk mengusulkan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan.
- 3) Pihak kecamatan yang bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi dan memfasilitasi dalam hal pembahasan pengelolaan ADG.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan pemberdayaan perekonomian kerakyatan yaitu:

- a) Adanya program yang lebih diprioritaskan oleh pihak Gampong, namun program pemberdayaan perekonomian kerakyatan tetap menjadi fokus untuk dituangkan dalam APBG.
- b) Kurangnya kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga saat program sudah ditetapkan dalam APBG, program tidak berjalan dengan lancar ataupun tidak dilanjutkan dalam tahun anggaran baru.

- c) Kurangnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga program tidak berjalan lancar dan hasilnya masih belum maksimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberdayaan perekonomian kerakyatan belum menjadi program khusus dan fokus daripada pemerintah Gampong Bueng Bakjok. Adapun pemberdayaan perekonomian kerakyatan pernah menjadi program dalam pembangunan Gampong. Berbagai program seperti budidaya ikan, pembuatan kue, penanaman bibit buahan pernah dilaksanakan namun tidak bertahan lama dan tidak berjalan lancar.
2. Faktor pendukung dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu: pemerintah Gampong diberikan hak untuk mengelola ADG yang telah diatur dalam aturan pemerintah, adanya kesediaan perangkat pemerintahan Gampong beserta masyarakat untuk berdiskusi dalam musyawarah Gampong terkait pengelolaan ADG termasuk untuk mengusulkan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan serta pihak kecamatan yang bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi dan memfasilitasi dalam hal pembahasan pengelolaan ADG. Sedangkan Faktor penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu: Adanya program yang lebih diprioritaskan oleh pihak Gampong, kurangnya kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga saat program sudah ditetapkan dalam APBG program tersebut tidak berjalan dengan lancar ataupun tidak dilanjutkan dalam tahun anggaran baru serta kurangnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan pemberdayaan

perekonomian kerakyatan sehingga program tidak berjalan lancar dan hasilnya masih belum maksimal.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Gampong untuk mengevaluasi kembali program yang diusung dan dimasukkan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan dikarenakan dengan adanya program ini, dapat menekan angka kemiskinan serta dapat mencapai cita-cita yaitu kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Pemerintah Gampong juga diperlukan untuk mengontrol berbagai program pemberdayaan perekonomian sehingga program berjalan dengan baik serta terkendali dan bisa dilanjutkan dalam tahun anggaran baru untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan.
3. Kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk memberikan edukasi kepada Gampong dalam hal mengelola pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga bagi masyarakat yang belum menguasai pengetahuan dalam mengelola program akan dapat mengetahui dengan harapan agar program tersebut bisa mencapai hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Fachri Yasin, dkk, 2002. *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru: Unri Press
- Aduwina Pakeh, 2018. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kab. Aceh Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Teuku Umar
- Anslem Strauss & Juliet Corbin, 2013, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Deliarnov, 2009. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Faizatul Karimah, dkk, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 4
- Hanifa Tsany Hasna, 2015. *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia*, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta
- Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika

Irfan Syauqi Beik Dan Laily Dwi Arsiyanti, 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Lyncolyn Arsyad, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE Edisi Pertama

M. Sholahuddin, 2007, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mardalis, 2006, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Margono, 2004 *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetke 4, Jakarta: Rhineka Cipta

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 2009. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Mubaryo, 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media, Cet.Ke-1

Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara dan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS)

Sadono Sukirno, 2015, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, *Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, Universitas Tabrani Pekanbaru

Sherly Ferdinandus, 2014. *Pengaruh Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Di Kota Ambon*, Benchmark, Vol. 2. No. 3

Siti Muslihatun, 2017. *Analisis Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel.*

*Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu*), Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Bengkulu

Soeharto Prawiro Kusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep Kebijakan dan Strategi*,  
Yogyakarta: BPFE

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, Bandung: Alfabeta

Sulistiyono, 2019. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan  
Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi  
Lampung Tahun 2013-2015)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN  
Raden Intan Lampung

Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press

Zulkarnain, 2006. *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil  
Menengah Dan Penduduk Miskin)*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1700/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

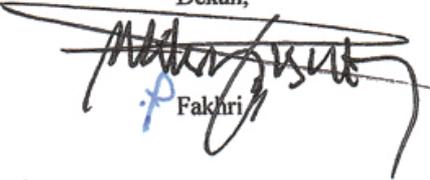
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Ansarullah  
NIM/Jurusan : 170403056/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 04 Mei 2021 M  
22 Ramadan 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,



Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 Mei 2022



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.38287/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Kecamatan Kuta Baro
2. Keuchik Gampong Bueng Bakjok

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANSARULLAH / 170403056**  
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 September 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN KUTA BARO  
GAMPONG BUENG BAKJOK**

Jl. Blang Bintang Lama, Aceh Besar Kode Pos 23372

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 238/BB/SK I /XI/2021

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafidh Maksum  
Jabatan : Keuchik  
Alamat : Bueng Bakjok

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

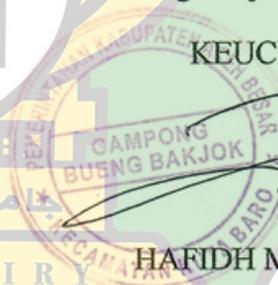
Nama : ANSARULLAH  
NIM : 170403056  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Alamat : Punge Jurong  
Sekolah/Univ. : UIN Ar-Raniry

Telah selesai melakukan pengumpulan Data di Gampong Bueng Bakjok, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar selama 2 (Hari) hari, terhitung mulai tanggal 1 November s/d selesai untuk memperoleh data dalam rangka Penelitian yang merupakan tugas Akhir dari mata Kuliah Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bueng Bakjok, 9 November 2021

KEUCHIK



AR-RANIRY

HAFIDH MAKSUM, M. Pd

### Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pengelolaan ADG di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah ADG juga digunakan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan?
3. Sejauh mana prioritas penggunaan ADG dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan?
4. Ekonomi kerakyatan apa saja yang di prioritaskan dalam ADG di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
5. Apakah ADG yang digunakan untuk ekonomi kerakyatan dapat menjamin pembangunan serta kemakmuran masyarakat?
6. Bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan apa saja yang sudah di laksanakan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
7. Bagaimana sistematika penyusunan penggunaan ADG dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaan ADG dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ansarullah  
Tempat/tanggal lahir : Sanggeu, 10 Desember 1999  
Status Perkawinan : Belum Nikah  
Agama : Islam  
Alamat : Punge Jurong  
Nomor Telepon : 0822-8658-5400

### Data Orang Tua

Ayah : Iskandar Nurdin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Fakhriani  
Pekerjaan : IRT

### Pendidikan Formal

2005-2011 : SD Negeri 1 Sanggeu  
2011-2014 : SMP Negeri 2 Sigli  
2014-2017 : SMA Negeri 14 Iskandar Muda Banda Aceh  
2017-2021 : Program S1 Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry



Lampiran 4, Dokumentasi





